



Judul : Komisi VII usulkan peta jalan, sektor perfilman butuh regulasi lebih adaptif
Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Komisi VII Usulkan Peta Jalan Sektor Perfilman Butuh Regulasi Lebih Adaptif

ANGGOTA Komisi VII DPR Novita Hardini menilai, UU Perfilman saat ini tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi serta platform distribusi digital dunia. Industri kreatif global menuntut adanya aturan hukum yang lebih progresif serta adaptif. Aturan baru itu harus berpihak penuh pada seluruh kepentingan komersial dan ekosistem sinema Tanah Air.

Penguatan industri sinema tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur atau penambahan layar bioskop secara masif. Sektor ini membutuhkan arah kebijakan yang jelas serta berkelanjutan. "Pemerintah perlu memiliki peta jalan berbasis data sebelum mengambil berbagai keputusan strategis demi kemajuan bangsa," ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, peta jalan itu harus memuat indikator keberhasilan terukur bagi seluruh pihak. Mulai dari peningkatan kesempatan kerja hingga pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terhubung langsung dengan industri film. Penguatan ekonomi kreatif daerah dan kesejahteraan pekerja kreatif juga wajib diperhatikan.

Keberhasilan industri film, sambungnya, tidak boleh hanya diukur dari jumlah layar atau tiket yang terjual ke penonton. Aspek yang jauh lebih bermakna adalah seberapa besar sektor ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi nasional. "Lapangan kerja baru harus terbuka demi kesejahteraan

masyarakat," katanya.

Dia meminta Pemerintah menghadirkan kajian independen komprehensif mengenai dampak ekonomi nyata daripada penambahan layar bioskop. Setiap kebijakan strategis itu harus didasarkan pada kebutuhan industri dan kondisi riil masyarakat. Pengembangan ekosistem secara menyeluruh harus diutamakan daripada sekadar membangun infrastruktur fisik belaka di daerah.

Publik, sambungnya, tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis maju. Karena yang harus diperkuat adalah ekosistem, keberpihakan regulasi, serta kemampuan masyarakat menikmati hasil pembangunan itu. "Sinergi seluruh elemen masyarakat jadi kunci utama keberlanjutan perfilman nasional," tegasnya.

Senada, anggota Komisi VII DPR Rico Sia mendorong revisi UU 33/2009 tentang Perfilman agar selaras dengan perkembangan ekosistem digital dan kecerdasan buatan. Kajian saat ini terlalu terpaku pada bioskop di kota besar. Padahal platform digital juga mampu menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.

Rico lalu menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam industri perfilman global sebagai tantangan nyata saat ini. Regulasi yang ada sekarang belum mengakomodasi fenomena itu, seperti munculnya aktor AI di Hollywood. Langkah antisipasi yang matang dan jelas ke depan sangat dibutuhkan. ■ PYB